

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Taufiq, Hidayah, dan Perkenan-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat melalui media website Kabupaten Tegal. Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban kami secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ingin kami sampaikan sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 meliputi capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pemerintah pelayanan dasar, hasil EPPD dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 telah berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, tetapi kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Kesemuanya ini tidak lepas berkat kerja sama antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, unsur TNI dan Polri, serta semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dukungan masyarakat Kabupaten Tegal yang tak ternilai harganya.

A. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tegal Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,39	68,79	0,585
2.	Angka Kemiskinan	8,14%	8,60%	5,651
3.	Angka Pengangguran	9,82%	9,97%	1,527
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,48%	3,72%	351,351
5.	Pendapatan Perkapita	Rp 22,15 jt	Rp 23,21jt	4,786
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2021

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran secara komprehensif tingkat capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM tersusun dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi

pengetahuan, dan dimensi perekonomian. Ketiga dimensi tersebut dianggap mampu menggambarkan pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karena itu perkembangan ketiga dimensi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan IPM suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah sebesar 68,79 atau tumbuh 0,58 persen (meningkat 0,40 poin) dibandingkan capaian tahun 2020.

Peningkatan IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,92 persen dibanding tahun 2020.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Tegal yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,89 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat cukup tajam yaitu 1,74 persen atau naik 0,22 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,67 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari 6,98 tahun menjadi 6,99 tahun pada tahun 2021.

Dari sisi kesehatan, bayi di Kabupaten Tegal yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,72 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Ekonomi Kabupaten Tegal pada 2020 masih mengalami kontraksi sebesar 1,46 persen. Semua sektor ekonomi terkontraksi, namun sektor pertanian masih dapat tumbuh positif di tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri dampak ekonomi yang disebabkan Pandemi Covid-19 masih terasa sampai awal tahun 2021.

Pandemi Covid-19 memukul industri di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Belasan perusahaan berhenti beroperasi dan merumahkan karyawannya. Pada awal tahun 2021 terdapat 11 perusahaan yang berhenti beroperasi karena terdampak pandemi Covid-19. Informasi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, pekerja yang dirumahkan dari 11 perusahaan di Kabupaten Tegal yang berhenti beroperasi jumlahnya lebih dari 1000 orang. Dan jumlah pekerja yang terdampak itu kemungkinan masih bisa bertambah.

Informasi dari salah satu konsultan pendamping UMKM, UMKM di Kabupaten Tegal kebanyakan mengurangi produksi dan merumahkan karyawan. Mereka terus berjuang menghadapi tantangan ekonomi di saat pandemi wabah Corona.

Bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah. Namun pada awal 2021, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menanggukkan penyaluran 1011 bansos tidak tepat sasaran. Adanya indikasi kelalaian petugas operator desa yang memasukkan dan mengunggah data warganya

tanpa melalui Musdes, Dinsos juga menengarai jarak waktu pengumpulan data tambahan calon penerima BST dari Kemensos yang sangat terbatas menjadi juga menjadi salah satu penyebabnya.

Adanya aturan pembatasan wilayah, menyebabkan banyak pedagang di obyek wisata dan supir angkutan dalam kota yang menganggur. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tegal di awal tahun 2021 mengakibatkan air Sungai Rambut dan Logeni meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga di sejumlah desa di jalur Pantura di dua kecamatan, yakni Kecamatan Warureja dan Jatinegara kebanjiran. Awal tahun juga terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan jalan masuk obyek wisata Guci amblas walaupun masih bisa dilalui tapi terjadi kemcatan yang parah. Jalur distribusi pangan terganggu. Akibatnya kunjungan di obyek wisata berkurang dan harga beberapa komoditas juga merangkak naik di awal tahun 2021.

3. Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan (www.bps.go.id), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2004). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia penduduk produktif di Kabupaten Tegal. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 1.080.674 orang, naik sebanyak 0,5 persen dibanding pada Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 66,24 persen, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tegal pada Agustus 2021 sebanyak 715.845 orang, bertambah sebanyak 621 orang dibanding pada Agustus 2020. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebanyak 644.499 orang, berkurang sebanyak 479 orang dibanding setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 71.346 orang, mengalami kenaikan sekitar 1.100 orang dibanding tahun 2020.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 mengalami pemulihan sejak dimulainya pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal 2020. Hal ini ditandai dengan arah pertumbuhan yang positif. Peningkatan kondisi ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (ADHB) dan atas dasar harga Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Peningkatan nilai PDRB dipengaruhi oleh adanya perubahan harga pada tingkat konsumen dan juga perubahan volume konsumsi berdasarkan perubahan pada nilai PDRB ADHB yaitu dari Rp35.300.027,84 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp 37.335.993,58 Juta pada tahun 2021.

Selain dinilai ADH Berlaku, PDRB juga dinilai ADH Konstan 2010 yang menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, tanpa ada pengaruh perubahan harga dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 24.492.665,57 Juta yang meningkat menjadi Rp25.402.911,06 Juta di tahun 2021. Oleh karena itu, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,72 % pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Pendapatan Perkapita

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum maka kita menghitung Pendapatan Perkapita yang dihitung dari Pendapatan Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun.

Pada tahun 2020 pendapatan perkapita Kabupaten Tegal adalah 22,15 juta rupiah sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 23,21 juta rupiah.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, dan masih menjadi isu penting untuk diatasi.

Pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses yang hasilnya bersifat multi dimensional, yang mencakup berbagai perubahan atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat. Disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan diperlukan. Masalah ketimpangan perlu menjadi focus utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk diharapkan diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk secara utuh.

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan	NO IKK	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,05
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,73
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72,71
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,55
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,09

		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	33,33
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,94
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,25
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,81
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,61
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,83
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12,82
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47,66
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,04
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72,42
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82,53
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	65,20
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	78,22998029
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	1,5
		21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	22
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	49
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
		25	Rasio kemandapan jalan	83

		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	-
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	-
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	23,48430139
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,417754885
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,252265888
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,13%
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,02
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,00
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	33,84
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	58,73
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	14,89
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	66,11
8		47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,59

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,009
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,120
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	11,20
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	90,78
		52	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	87,81
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	90,78
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	-
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	60,67
				16,58
				34,48
				9,61
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	80,04
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	64,29
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	100,00
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	31,15
		62	Kepemilikan Akte Kelahiran	95,39289996
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4,166666667
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	83,87
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	150
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	0,00
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,77
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	14,73

15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	70,30
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,41
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	20,83%
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	37,50%
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	67,13%
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	61%
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	-82,35%
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,11%
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,83%
		79	Peningkatan prestasi olahraga	2,0
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	45,58139535
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	14,66666667
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,63
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21,70
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 UU No 43/2009 tentang Kearsipan	50,00
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan barbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, layanan publik dan kesra	0,50
Urusan Pilihan				
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	4.004,097
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100,0
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-7,979
		91	Tingkat hunian akomodasi	3702,92%

		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,962470048
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,914353606
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	642,961
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	87,333
28	Kehutanan			-
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	surat keterangan
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	79,73719545
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	89,9517996
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (JTTP) bertanda tera sah yang berlaku	61,21822034
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,932049481
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	40
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	surat keterangan
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	surat keterangan
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	29,00
32	Transmigrasi	-	-	-

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan	NO IKK	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	16,803857
		2	Rasio PAD	18,492573

		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,65
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	15,623422
		6	Opini Laporan Keuangan	100,00
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	89,821
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	96,38
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,52
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,09
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92,62
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	125,81
		15	Assets management	100
		16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	13,161939
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100

C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Hasil Pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Nasional Kementerian Dalam Negeri untuk LPPD Tahun 2020 hasilnya belum diumumkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk Tahun 2021 masih dalam proses penilaian.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 Sampai dengan 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.750.790.210.000,00	2.862.651.471.052,00	104,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	469.765.165.000,00	591.004.284.313,00	125,81
Pajak Daerah	133.050.000.000,00	143.617.868.928,00	107,94
Retribusi Daerah	22.447.112.000,00	20.911.507.338,00	93,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.417.021.000,00	15.417.023.399,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	298.851.032.000,00	411.057.884.648,00	137,55
PENDAPATAN TRANSFER	2.129.195.245.000,00	2.117.374.969.793,00	99,44
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.550.193.467.000,00	1.533.598.637.942,00	98,93
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	30.110.971.000,00	42.890.214.753,00	142,44
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.077.039.778.000,00	1.077.039.778.000,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	155.693.681.000,00	125.814.842.815,00	80,81
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.349.037.000,00	287.853.802.374,00	100,18
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	378.196.584.000,00	378.196.584.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	18.742.708.000,00	18.742.708.000,00	100,00
Dana Desa	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	100,00
Transfer Pemerintah - Provinsi	200.805.194.000,00	205.579.747.851,00	102,38
Pendapatan Bagi Hasil	181.202.194.000,00	186.620.461.851,00	102,99
Bantuan Keuangan	19.603.000.000,00	18.959.286.000,00	96,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.829.800.000,00	154.272.216.946,00	101,61
Pendapatan Hibah	6.500.000.000,00	5.631.258.846,00	86,63
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.329.800.000,00	148.640.958.100,00	102,28
BELANJA DAERAH	2.467.200.647.000,00	2.285.151.931.627,00	92,62
BELANJA OPERASI	2.027.307.962.130,00	1.905.870.135.761,00	94,01
Belanja Pegawai	1.119.870.986.289,00	1.072.594.469.688,00	95,78
Belanja Barang dan Jasa	833.631.449.841,00	763.648.877.353,00	91,61
Belanja Hibah	70.427.526.000,00	66.338.288.720,00	94,19
Belanja Bantuan Sosial	3.378.000.000,00	3.288.500.000,00	97,35
BELANJA MODAL	423.892.684.870,00	368.877.462.091,00	87,02
Belanja Modal Tanah	1.511.000.000,00	384.882.542,00	25,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.164.469.120,00	94.646.809.885,00	86,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.630.442.450,00	128.622.796.811,00	84,27
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.075.944.100,00	143.805.033.653,00	93,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.510.829.200,00	1.417.939.200,00	21,78
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	65,03
Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	65,03
TRANSFER	494.685.660.000,00	491.512.110.860,00	99,36
TRANSFER	494.685.660.000,00	491.512.110.860,00	99,36
Transfer Bagi Hasil	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	78,84
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	78,84
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	100,00
Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.961.886.307.000,00	2.776.664.042.487,00	93,75
SURPLUS / (DEFISIT)	-211.096.097.000,00	85.987.428.565,00	-40,73
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	218.096.097.000,00	218.130.182.486,02	100,02
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	218.096.097.000,00	218.096.097.806,02	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	34.084.680,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00

Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	211.096.097.000,00	211.130.182.486,02	100,02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	297.117.611.051,02	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited

**Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Urusan
Sampai dengan 31 Desember 2021**

URUSAN/PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	2.750.790.210.000,00	2.862.651.471.052,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	285.817.771.000,00	396.614.419.180,00
Pendidikan	0,00	109.407.537,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	109.407.537,00
Kesehatan	285.372.051.000,00	395.718.226.593,00
Dinas Kesehatan	285.372.051.000,00	395.718.226.593,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.360.000,00	567.854.370,00
Dinas Pekerjaan Umum	425.360.000,00	567.854.370,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.660.000,00	58.949.180,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	16.660.000,00	58.949.180,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.700.000,00	159.981.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000,00	67.876.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	92.105.000,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5.867.315.000,00	6.192.434.035,00
Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00	2.716.786.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00	2.716.786.500,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.400.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.400.000,00
Perhubungan	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00
Dinas Perhubungan	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00
Penanaman Modal	1.882.487.000,00	1.474.345.510,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.882.487.000,00	1.474.345.510,00
Urusan Pilihan	15.195.538.000,00	13.428.468.148,00
Kelautan dan Perikanan	199.077.000,00	232.281.142,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	199.077.000,00	232.281.142,00
Pariwisata	7.722.170.000,00	5.419.286.588,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	7.722.170.000,00	5.419.286.588,00
Pertanian	5.000.000,00	25.994.305,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000,00	25.994.305,00
Perdagangan	6.578.140.000,00	6.946.131.617,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.578.140.000,00	6.946.131.617,00
Perindustrian	691.151.000,00	804.774.496,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	691.151.000,00	804.774.496,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.443.909.586.000,00	2.446.416.149.689,00
Keuangan	2.443.733.267.000,00	2.446.258.135.864,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	133.050.000.000,00	143.901.964.238,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.310.683.267.000,00	2.302.356.171.626,00
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	176.319.000,00	158.013.825,00
Kecamatan Dukuhturi	0,00	2.000,00
Kecamatan Kramat	30.000.000,00	30.200.625,00
Kecamatan Slawi	146.319.000,00	127.811.200,00
BELANJA DAERAH	2.961.886.307.000,00	2.776.664.042.487,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.890.525.843.000,00	1.762.752.228.575,00
Pendidikan	932.747.190.000,00	897.272.638.709,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.747.190.000,00	897.272.638.709,00
Kesehatan	724.628.240.000,00	648.273.338.662,00
Dinas Kesehatan	724.628.240.000,00	648.273.338.662,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.173.510.000,00	147.714.399.530,00
Dinas Pekerjaan Umum	141.908.510.000,00	135.337.920.350,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	15.265.000.000,00	12.376.479.180,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	43.628.724.000,00	41.736.749.001,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	43.628.724.000,00	41.736.749.001,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.146.535.000,00	19.039.948.758,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.893.155.000,00	12.719.551.808,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.253.380.000,00	6.320.396.950,00
Sosial	9.201.644.000,00	8.715.153.915,00
Dinas Sosial	9.201.644.000,00	8.715.153.915,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.271.911.000,00	109.483.494.447,00
Tenaga Kerja	1.046.000.000,00	896.579.800,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.046.000.000,00	896.579.800,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.409.910.300,00	4.152.111.238,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB	4.409.910.300,00	4.152.111.238,00
Pangan	333.970.000,00	311.567.217,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	333.970.000,00	311.567.217,00
Pertanahan	4.865.000.000,00	3.393.373.073,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.865.000.000,00	3.393.373.073,00
Lingkungan Hidup	19.320.135.000,00	17.504.802.734,00
Dinas Lingkungan Hidup	19.132.370.000,00	17.320.197.334,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	187.765.000,00	184.605.400,00
Administrasi Kependudukan dan Capil	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.248.108.000,00	11.637.253.831,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.248.108.000,00	11.637.253.831,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.469.156.700,00	7.322.392.947,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB	8.469.156.700,00	7.322.392.947,00
Perhubungan	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00
Dinas Perhubungan	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00
Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00	8.386.247.888,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00	8.386.247.888,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00	854.139.406,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00	854.139.406,00
Penanaman Modal	5.130.204.000,00	4.541.620.681,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.130.204.000,00	4.541.620.681,00
Kepemudaan dan Olah Raga	6.609.299.000,00	5.927.711.257,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	6.609.299.000,00	5.927.711.257,00
Statistik	251.011.500,00	241.783.030,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	251.011.500,00	241.783.030,00
Persandian	230.724.000,00	216.949.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	230.724.000,00	216.949.500,00
Kebudayaan	2.244.523.000,00	1.640.418.154,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.244.523.000,00	1.640.418.154,00
Perpustakaan	424.679.000,00	366.901.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	424.679.000,00	366.901.000,00
Kearsipan	3.730.586.000,00	3.418.551.041,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.730.586.000,00	3.418.551.041,00
Urusan Pilihan	68.941.723.000,00	64.315.465.209,00
Kelautan dan Perikanan	8.016.974.500,00	7.493.100.514,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	8.016.974.500,00	7.493.100.514,00
Pariwisata	9.526.323.000,00	8.952.423.770,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	9.526.323.000,00	8.952.423.770,00
Pertanian	24.936.406.500,00	23.246.536.519,00

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	316.097.500,00	290.019.441,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.620.309.000,00	22.956.517.078,00
Perdagangan	15.725.851.000,00	15.376.858.081,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.725.851.000,00	15.376.858.081,00
Perindustrian	10.716.168.000,00	9.246.546.325,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.716.168.000,00	9.246.546.325,00
Transmigrasi	20.000.000,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00	0,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	880.146.830.000,00	840.112.854.256,00
Administrasi Pemerintahan	63.982.606.000,00	59.573.379.003,00
Sekretariat Daerah	63.982.606.000,00	59.573.379.003,00
Pengawasan	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00
Inspektorat	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00
Perencanaan	7.192.753.000,00	6.475.847.967,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.192.753.000,00	6.475.847.967,00
Keuangan	678.900.976.000,00	657.919.116.339,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.786.668.000,00	11.075.305.710,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	665.114.308.000,00	646.843.810.629,00
Kepegawaian	9.913.869.000,00	7.939.439.720,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.913.869.000,00	7.939.439.720,00
Pendidikan dan Pelatihan	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00
Penelitian dan Pengembangan	989.854.000,00	789.865.200,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	989.854.000,00	789.865.200,00
Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00	55.990.299.657,00
Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00	55.990.299.657,00
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	46.429.200.000,00	39.651.880.481,00
Kecamatan Adiwerna	1.726.686.000,00	1.441.026.447,00
Kecamatan Balapulang	2.147.361.000,00	1.820.789.463,00
Kecamatan Bojong	1.919.060.000,00	1.563.595.050,00
Kecamatan Bumijawa	1.938.369.000,00	1.613.335.853,00
Kecamatan Dukuhturi	1.862.340.000,00	1.525.153.056,00
Kecamatan Dukuhwaru	1.872.427.000,00	1.533.917.097,00
Kecamatan Jatinegara	1.834.058.000,00	1.497.976.699,00
Kecamatan Kedungbanteng	1.774.501.000,00	1.346.873.216,00
Kecamatan Kramat	3.917.208.000,00	3.461.846.665,00
Kecamatan Lebaksiu	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00
Kecamatan Margasari	2.211.178.000,00	1.952.916.184,00
Kecamatan Pagerbarang	1.954.983.000,00	1.483.236.621,00
Kecamatan Pangkah	1.737.162.000,00	1.395.252.466,00
Kecamatan Slawi	11.654.160.000,00	10.865.230.175,00
Kecamatan Suradadi	1.942.829.000,00	1.592.996.888,00
Kecamatan Talang	2.047.240.000,00	1.653.659.194,00
Kecamatan Tarub	1.935.569.000,00	1.557.877.364,00
Kecamatan Warureja	2.016.035.000,00	1.735.200.319,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00	4.186.941.252,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00	4.186.941.252,00
PEMBIAYAAN DAERAH		
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
Keuangan		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	218.096.097.000,00	218.130.182.486,02

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited.

E. INOVASI DAERAH

Pada tahun 2021 inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Nama Inovasi	
1	Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	1	Lapor Bupati Tegal
		2	Jalabia (Jualan Bareng Umi-Ardie)
		3	Loken (Podcast atau program tayangan bincang-bincang bersama tokoh atau narasumber melalui seminar media sosial)
		4	Merdeka Sampah
2	Bagian Hukum	5	CARIDAKU (Pencarian Produk Hukum)
3	Bagian Organisasi	6	SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat)
4	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	APLIKASI STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BERBASIS DATA /WEB YANG TERINTEGRASI DENGAN SIPD KEMENDAGRI
5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	8	e-Tamu
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	SIMANTAPBAJA (Sistem Pemantauan Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa)
7	Bagian Pemerintahan	10	SIPATEN OKE (Sistem Informasi PATEN Online Kecamatan)
8	Sekretariat DPRD	11	SIPP (Sistem Informasi Pokok Pikiran DPRD)
9	Dinas PU	12	MATARAM (inforMAsi digiTAl pemelihaRaan jalan kecAmatan kraMat)
		13	Sistem Informasi Jalan Mantap Bebas Lubang berbasis Geographic Information System(GIS) (Si JAMBLANG)
10	Dinas Perkimtaru	14	PEMBUATAN DATABASE JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TEGAL
		15	PEMBUATAN DATABASE PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL
11	Dinas Kesehatan	16	KAFETA (Kafe Bayi dan Balita)
12	UPTD Puskesmas Bumijawa	17	SIGAP TANGI (akSI tangGAP TANGani masalah gizl)
13	UPTD Puskesmas Kedungbanteng	18	Gerakan Memasak Supaya Anak Lahap Makan (GEMAS SALAM)
14	UPTD Puskesmas Adiwerna	19	PAMORINA (Paguyuban Kader Motivator KIA Adiwerna)
15	UPTD Puskesmas Jatinegara	20	SERUNI (Sehat Ruhani dan Jasmani)
16	UPTD Puskesmas Danasari	21	GENIT BAE (Gerakan moNIToring Bayi Asi Eksklusif)
17	UPTD Puskesmas Kramat	22	PAWON SIMBOK (Demo masak makanan sesuai umur anak balita)
18	UPTD Puskesmas Lebaksiu	23	Gebetanku mantap (Gerakan berantas TBC dengan keluarga, Masyarakat dan petugas)
19	UPTD Puskesmas Pangkah	24	MELATI PAGIKU (Melayani Sepenuh hati Penderita Gangguan Jiwa dan keluarga)
20	UPTD Puskesmas Balapulang	25	BALAKURAWA (BERI ASUHAN LANGSUNG KUNJUNGAN KELUARGA RAWAN)
21	UPTD Puskesmas Penusupan	26	PETE LAN MIRONG (PENusupan TELAtaN Mrlksa njeRONE Gigi)

22	UPTD Puskesmas Kupu	27	GEMASTING (Gerakan Masyarakat Sadar Stunting)
23	UPTD Puskesmas Kupu	28	KURMA PATI (Kunjungan Rumah Pasien TB)
24	Dinas Sosial	29	SIDANIK (Aplikasi Pematangan NIK)
		30	SLRT Trengginas Contact Center
		31	Inovasi layanan publik melalui nomor Whatsapp. sebagai sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran dan aduan terkait pelayanan sosial
25	Dinas Dikbud	32	Data-ku
		33	Kenali Sejarah Tegal
26	Dinas Perinnaker	34	Avocado (Aplikasi Lacak Data Pelaku Usaha Kabupaten Tegal)
		35	Klinik Industri
		36	Penggunaan Tools Tracking Guna Meningkatkan Kecepatan Penyusunan SPJ
27	Dinas P3A dan P2KB	37	KeRen (Keluarga teRencana) Mobile
		38	OPERA (OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN)
28	Dinas LH	39	Pelayanan Terpadu Perizinan Lingkungan Hidup (PELTU PILIH)
		40	Sistem informasi dokumen lingkungan hidup (SIDUL) aplikasi yang terintegrasi dan berbasis website
29	Dinas Dukcapil	41	WARUNG DUKCAPIL DESA (WADUK DESA)
		42	PELAYANAN ONLINE ADMINDUK MENJANGKAU MASYARAKAT (PENA JAYA)
		43	PELAYANAN "LAIR OLIH AKTE KARO KK (LOAK)" / LOAK PLUS
30	Dinas Permasdes	44	QR Code untuk Aset Perangkat Daerah (QR ASET)
		45	Desa PengANGGURan
31	Dinas Perhubungan	46	APIKEPOL (Aplikasi Perlengkapan Parkir Pembayaran Online)
		47	SING KEREN (Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pembayaran Online)
32	Dinas Kominfo	48	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Office)
		49	Aplikasi SmartCity Kabupaten Tegal "SegaLengko (Sistem Elektronik Cerdas Kabupaten Tegal Lengkap dan Komplit)"
33	Dinas PM dan PTSP	50	LAYANAN ANTAR GRATIS (LARIS)
		51	DATANG OLIH IZIN (DOI)
		52	KLINIK INVESTASI SI CANTIK DAN OSS (KLIN-CAOS)
34	Dinas Porapar	53	ABIDOL
		54	SIMPEL
35	Dinas Arpus	55	I-Pusda Kab Tegal
		56	Pocilib (http://pocilib.tegalkab.go.id)
36	Dinas Tan dan KP	57	SI MAPAN (Sistem Informasi Tanaman Pangan)
37	UPTD Perlindungan Tanaman	58	Pengembangan Biopestisida Dalam Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan
38	Dinas KPP	59	Budidaya "LELAKI" (Lele Lahan Kering)

		60	"BONG APIK" CEROBONG ASAP PENGOLAHAN IKAN
39	Dinas Dakop dan UKM	61	DOLAN (dodolan Online) (dolan.tegalkab.go.id)
		62	E-Retribusi
		63	TRASA Co-Working Space
40	Satpol PP	64	SOSIS KUDA (Sosialisasi Ketertiban Umum Dengan Bersepeda)
		65	PANSER DUMAS (Pakaian Seragam Pengaduan Masyarakat)
41	Inspektorat	66	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mitra Desa
		67	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mitra OPD
42	Bappeda dan Litbang	68	ABANG KUWAT (Akselerasi pembANGunan melalui Kolaborasi UMKM-Wirausaha Kabupaten Tegal)
		69	Alat Pemilah Sampah Plastik Bernilai Ekonomis
		70	Insentif Penelitian (Insentif Penelitian Tematik bagi Dosen Perguruan Tinggi
		71	KreNOVA ONLINE
		72	Batir Tegal
		73	Virtual Tourism
		74	Sinergi Layanan KI
		75	Ruang Penulis Masyarakat
		76	Pilot Sampah
		77	Literasi Digital Masa Kini Melalui Aplikasi "Eliterasi"
		78	Squid Village : Pemanfaatan Hebel Stone dalam pengembangan habitat dan kelimpahan cumi-cumi untuk kemandirian ekonomi masyarakat pesisir kabupaten Tegal
		79	Paving Blok terbuat dari sampah Plastik
		80	Daftar Beasiswa Prestasi Online
43	BKD	81	Aplikasi Presensi Berbasis Android
		82	Aplikasi E-Cuti
44	Bappenda	83	e-PBB (Pajak Bumi dan Bangunan Elektronik)
		84	e-PBB Mobile (Android)
45	BPKAD	85	Pusat Pelayanan Informasi & konsultasi APBD (APBD Service Center)
		86	Aplikasi SPPIDOL (Surat Perintah Pencairan Dana On Line)
46	Badan Kesbangpol	87	e-lit
		88	e-data
47	BPBD	89	TITIR BPBD Kab. Tegal
48	RSUD dr. Soeselo	90	LALA RT-PCR SOESELO (Layanan Laboratorium Real Time - Polymere Chain Reaction RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL)
		91	REMPEYEK (Rekam Medik Pelayanan Elektronik) di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
49	RSUD Suradadi	92	JALA PANDAWA (Jemput dan Antar Langsung Pasien Dengan Gangguan Jiwa)

		93	SIPUT PERKASA (Siap Antar Jemput Pasien Periksa)
50	Kecamatan Kramat	94	SAPI PAPAT Satu Pintu Pelayanan Cepat
		95	SUMPAH DADU " Sulap Sampah Dadi Duit "
51	Kecamatan Suradadi	96	SiMacan (Sistem Informasi Manajemen dan administrasi Kecamatan) Suradadi
		97	SIMPELDESA (Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa)
52	Kecamatan Warureja	98	FORDIS SADEWA (Forum Diskusi Antar Desa Se Kecamatan Warureja)
		99	PELANTAR SUKMA (Pelayanan Antar Surat Langsung Kepada Masyarakat)
53	Kecamatan Adiwerna	100	BANG SAMPAH
		101	POJOK BACA
54	Kecamatan Dukuhturi	102	GEMPI PAH (Gerakan Minim dan Pilah Sampah)
		103	PERAH SAPI (Pelayanan Ramah Satu Pintu)
55	Kecamatan Talang	104	UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS DALAM PEMBUATAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PADA KANTOR KECAMATAN TALANG
56	Kecamatan Tarub	105	Joko Tarub
		106	SINTA (Sistem Informasi Tarub Pemanfaatan Media Sosial dan Website Sebagai Sarana Konsultasi Pelayanan dan juga Layanan Pengaduan Yang diberikan oleh Kecamatan Tarub
57	Kecamatan Slawi	107	Taman Permainan Anak (TAMPAN)
		108	Ruang Pojok Laktasi
58	Kecamatan Lebaksiu	109	Ledis.P (Lebaksiu Disiplin Parkir)
		110	UPK Mart (Mini Market Desa)
59	Kecamatan Dukuhwru	111	E-SISDUYAN MADU (Elektronik-Sistem Informasi Pengaduan dan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru)
		112	PAK TRIMAN (Parkir Tertib, Rapi dan Aman)
60	Kecamatan Pangkah	113	GOES (Google form E-arsip SPJ Keuangan)
		114	Hotspot SUSANMAS (Hotspot Survei Kepuasan Masyarakat)
61	Kecamatan Kedungbanteng	115	Laporan Monitoring Pajak KOPAK (LAPTOP KOPAK)
		116	Persuratan On Line Kecamatan Kedungbanteng (PARUT OKE)
62	Kecamatan Jatinegara	117	Digitalisasi Arsip Dokumen Laporan Keuangan (GITARAN)
		118	Infografis Pelayanan Kecamatan (Grayatan)
63	Kecamatan Balapulang	119	MAHTEN MANAK (Rumah paten ramah anak)
		120	Gebyar Gemebyar Balapulang
64	Kecamatan Margasari	121	PANDU SAPIN Pelayanan terpadu satu pintu
		122	MAPS (Margasari Ayo Pilah Sampah)
65	Kecamatan Pagerbarang	123	RANTE PBB / Penderasan PBB melalui Peran RT

		124	J to B (Jelantah ke Biodiesel)
66	Kecamatan Bumijawa	125	(PONYA SUSU) “Pojok Tanya Senyum Selalu”
		126	Portal Jawa (Pojok Literasi Bumijawa)
67	Kecamatan Bojong	127	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PANDU SATU)
68	Perumda Tirta Ayu	128	GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
		129	SCADA

Sumber: BAPPEDA LITBANG KAB. TEGAL

PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan rasa penghargaan setulus - tulusnya kepada semua komponen dan lapisan masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas partisipasi, dukungan, saran dan kritik yang telah dicurahkan selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin kepada kita semua dalam upaya mengangkat kesejahteraan, taraf hidup, derajat serta memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat di Kabupaten Tegal dengan semangat mewujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH